

ISLAM, BUDAYA LOKAL DAN KEDEWASAAN BERBANGSA

Masyhur Abadi

*(Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan
Alumni Program Master Filsafat Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya)*

Abstrak:

Dengan gaya bahasa reflektif, memberontak dan “kiri”, artikel ini berusaha menunjukkan relasi konsisten-koherensial antara kedewasaan beragama yang mengejawantah dalam kedewasaan berbudaya yang akhirnya akan mengantarkan pada penjaminan kedewasaan berbangsa. Berislam, yang mencerminkan kedewasaan adalah keberagamaan yang berusaha menyadari bahwa praksis keagamaan bukan merupakan hakikat agama, sehingga –berislam—lebih merupakan tindakan manusia Muslim yang sadar budaya, sehingga untuk berislam tidak mesti mengidentifikasi diri sebagai Arab Murni, tetapi secara arif berusaha menyerap nilai lokalitas. Artinya, dewasa beragama, bermakna berusaha meletakkan yang universal pada tataran yang universal dan yang profan sebagai profan, memutlakkan yang mutlak dan merelatifkan yang relatif.

Kata kunci:

Islam, budaya lokal, kedewasaan berbangsa

Pendahuluan

Persoalan besar bangsa Indonesia adalah pencarian identitas keIndonesiaan dan pemaknaan konsep kewarganegaraan. Kedua hal ini wajar menjadi sumber dinamika dan sekaligus sumber pertikaian bangsa karena kedua persoalan tersebut merupakan fenomena baru yang eksistensinya masih lebih merupakan cita-cita dari para pendiri bangsa ini. Kelahiran Indonesia sebagai entitas negara dan bangsa

yang “hanya”¹ berbekal semangat yang mewujud pada konsep besar NKRI. Adapun wujud kongkritnya, paling tidak dari bukti kesejarahan, budaya dan politis, masih selalu dalam proses pencarian, bahkan sampai saat ini. Pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, apa wujud ke

¹ “hanya” [dalam tanda kutip] untuk menunjukkan istilah tersebut tidak dapat dimaknai sekadar dalam konteks makna denotatifnya, tetapi menyentuh segmentasi makna yang luas dan mencakup.

Indonesiaan dan apa arti menjadi Indonesia? Sungguh yang benar-benar eksis dalam pengertian sosio-kultural dan politis adalah realitas Nusantara. Tetapi realitas Nusantara ini bukanlah suatu entitas politis-kultural yang tunggal. Ia merupakan mosaik berbagai suku-bangsa dengan peragaan budaya, agama, dan politik yang beragam dan *independent*. Sehingga problem nyata bangsa ini adalah mencari model hubungan yang adil dan wajar antara entitas kedaerahan dan pusat dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, terkait dengan *cinta segi tiga* dari tema ini, hubungan Islam dan kebangsaan tidak akan tuntas sebelum hubungannya dengan budaya lokal/kedaerahan tuntas sebab kenyataan menunjukkan realitas Nusantara yang eksis terlebih dulu sebelum kelahiran rumah besar Indonesia, Islam merupakan unsur dominan pembentuk masing-masing lokalitas Nusantara terutama di sebagian besar Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan kepulauan lainnya. Artinya seorang Muslim harus menjawab dulu apa makna Islam bagi dirinya di satu sisi, dan apa pula makna sosio-kultural masyarakatnya baginya sebelum dia dapat menjawab persoalan makna menjadi manusia Indonesia.

Think Spiritually; Act Culturally

Menjadi Muslim berarti kesadaran untuk mematuhi semua ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-quran dan As-sunnah. Untuk pernyataan ini, penulis yakin semua Muslim sepakat. Persoalan muncul ketika seseorang menyadari dirinya sebagai Muslim di satu sisi, dan pada saat yang bersamaan sekaligus sebagai warga masyarakat dan bangsa. Sebagai warga masyarakat yang mendiami lokalitas tertentu dengan identitas etnis dan budaya tertentu, seorang Muslim senyatanya selalu melakukan dialog diri

antara keimanannya akan nilai-nilai agamanya dengan realitas sosio-kultural masyarakatnya. Dengan demikian, praksis keagamaan seseorang sesungguhnya selalu merefleksikan suatu peragaan kulturalnya. Inilah dasar mengapa studi tentang kebudayaan, selalu berarti kesiapan untuk terbuka terhadap nilai-nilai spiritualitas agama karena kebudayaan --dalam lapisan terdalamnya-- selalu menjadi lokus bagi peragaan spiritualitas seseorang bersama-sama komunitasnya. Demikian juga dalam setiap studi tentang agama, seseorang harus terbuka terhadap dimensi kultural yang mengiringi semua praksis keagamaan.

Dalam dialog agama-kebudayaan yang niscaya terjadi pada setiap individu, --persoalan krusial yang harus disadari-- adalah bahwa nilai-nilai dasar agama yang mewujudkan pada keimanan adalah sesuatu yang telah sempurna, dalam arti seseorang dengan kesadaran dirinya telah menyerahkan sendiri kepercayaannya kepada agama tersebut. Sementara budaya selalu dinamis, sebab jika tidak, maka ia akan menjadi beku di tengah-tengah dinamika masyarakatnya. Hakekat keimanan agama adalah paripurna dan transenden, sementara realitas budaya selalu relatif dan imanen. Inilah problem autentisitas manusia beragama dan sekaligus berbudaya.

Sebagai sebuah nilai dasar yang melampaui zaman dan tempat, pemaknaan ajaran agama jelas memerlukan kecerdasan dan kedewasaan dari penganutnya yang juga merupakan manusia berbudaya. Kedewasaan tersebut termaktub dalam paradigma : "*Praksis keagamaan adalah bukan hakekat agama itu sendiri. Ia lebih merupakan tindakan manusia berbudaya yang beragama*". Mengabaikan paradigma ini akan berujung pada kezaliman terhadap agama dan budaya itu sendiri. Seringkali seseorang memutlakkan yang relative, dan

merelatifkan yang mutlak.² Contoh yang menggambarkan persolan ini adalah masalah shalat dengan "sarung –baju takwakhopiah vs odeng-pesa'-gombor" (Contoh ini dapat diaplikasikan ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas lagi semisal Islam vs Partai Politik;)

Kedewasaan Beragama dan Berbudaya menjamin Kedewasaan Berbangsa: Individu vs Citizen

Penerimaan paradigma di atas akan menjadi jaminan kedewasaan individu dan masyarakatnya dalam menjalani kehidupan berbangsa. Konsep *individu* harus dibedakan dari warga negara (*citizen*). Individu selalu mengacu pada konsep *diri* (*self*) yang merupakan sesuatu yang asal dan *given*. (Bukankah saya tidak perlu menunggu persetujuan *Klebung* atau yang lain untuk menjadi manusia). Pada konsep individu inilah semua yang primordial berasal; dan untuk itu ia adalah sakral secara etis.³ Adanya konsep hak asasi manusia merupakan elaborasi dari konsep diri. Sementara konsep *warga-negara* merupakan konsensus dari individu-individu secara sadar dan *ksatria*. Sebagai sebuah wujud konsensus, jelas ia bersifat *artifisial* dan relatif yang merupakan salah satu saja dari tahapan individu-individu dalam capaian kulturalnya. (Bukankah saya kapan saja memiliki kemungkinan untuk ganti KTP, kewarganegaraan dan bahkan agama).

Agama, dalam hakekatnya sebagai keimanan, keterkaitannya adalah dengan individu dan bukan dengan konsep warga-

negara. Artinya, karena beragama atau tidak beragama merupakan pilihan individual secara sadar dan bebas yang pada akhirnya membentuk kediriannya, maka negara harus menjamin kebebasannya. Sementara konsep warga negara muncul sebagai konsensus antar individu-individu untuk tujuan bersama dalam menjalani kehidupan yang beradab. Sampai di sini mungkin ada godaan untuk terjatuh ke dalam sekularisme. Untuk itu harus dinyatakan bahwa sesungguhnya bagi seorang yang beragama, jika memahami agama sebagai spirit yang menyertai setiap denyut nafasnya, sekularisme pastilah tidak bermakna. Jelas di sini yang dimaksud adalah sekularisme sebagai ideologi yang mengusung seperangkat kepercayaan dan untuk itu setara dengan agama. Mungkin yang lebih tepat dapat dikatakan bahwa nilai-nilai spiritualitas agama mengaliri keseluruhan kedirian individu dan untuk itu pemilahan dikhotomis antara aspek-aspek duniawi dan Ilahi menjadi tidak relevan. Sungguh agama, dalam tataran nilai dan keimanan, selalu dapat melihat melampaui ruang dan waktu serta menerobos gelapnya materi (Bukankah di balik keindahan Taj Mahal kita dapat melihat kuasa cinta yang jelas-jelas spiritual jauh melampaui bentuk dan garis-garis arsitekturnya?)

Uraian singkat di atas membawa kepada kesimpulan bahwa imperasi agama bersifat moral-personal, sementara negara (wujud institusional dari konsensus individu-individu dalam kedudukannya sebagai warga-negara/*citizen*) adalah mengikat secara normative-kolektif. Meskipun bagi individu yang beragama, dalam pandangan personalnya, yang normative-kolektif tersebut selalu melekat nilai-nilai spiritualitas agamanya karena kehidupan adalah peragaan keimanannya. Sekiranya konsep individu dan *citizen* ini dapat didudukkan secara "telanjang" apa adanya, maka dapat

² Meskipun dalam tataran kemuakan puncak terhadap modernisme Barat, terkadang kita tidak kritis terhadap setiap hal yang mengatasmakan tradisi. Sebagai bentuk perlawanan yang sifatnya darurat, kesan yang penting bukan Barat tersebut dapat dimaklumi. Tetapi ketika praksis atas nama tradisi ini menjadi kebal kritik, sesungguhnya kita telah memutlakkan sesuatu yang relatif.

³ Mohamed Arkoun, *Membongkar Wacana Hegemonik Dalam Pemikiran Islam Kontemporer*. Ter. Masyhur Abadi (Surabaya: Pustaka al-Fikr, 1999), hlm., 33.

diharapkan munculnya kedewasaan beragama yang pada gilirannya menjamin kedewasaan berbangsa. Dan jika di atas telah diajukan paradigma yang menjadi bingkai bagi kedewasaan beragama, maka kedewasaan berbangsa mensyaratkan kesadaran bahwa eksistensi bangsa merupakan wujud konsensus dari individu-individu secara bebas dan ksatria. Pernyataan ini paling tidak memiliki konsekuensi: *pertama*, Atas nama bangsa/negara tidak diperkenankan melanggar hak dasar individu *Kedua*, Sebagai hasil konsensus, konsep bangsa/negara sangat mungkin untuk berubah dan atau diubah.

Sebagai sebuah realitas politis-kultural modern yang mewujud pada sebuah negara bangsa (*nation state*)⁴, konsep warga-negara adalah baru dan khas Barat. Negara-negara dunia ketiga mengadopsi konsep ini setelah mereka memperoleh kemerdekaannya dari pemerintah kolonialisme Barat (dan sebagian besar negara-negara tersebut adalah negeri-negeri Muslim) baik di Asia maupun Afrika. Apa yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa konsep modern bangsa merupakan capaian kultural individu-individu merdeka dalam bidang politik-kenegaraan. Sementara budaya⁵ dalam pengertian yang luas adalah prestasi dan capaian manusia untuk memenuhi hajat hidupnya baik dalam

wujud material maupun non-material. Di sinilah kemudian terlihat hubungan dialektis antara budaya dan kewarganegaraan. Sungguh budaya yang dewasa merupakan aktualisasi dan (juga) sublimasi individu atau sekumpulan individu untuk memaknai, mengkritisi dan meneguhkan atau megubah makna kewarganegaraan yang mereka sepakati. Sementara itu nilai-nilai agama selalu *merasuki* semua tindakan dan peragaan kulturalnya.

Melampaui Keremehan

Ketika kita mengadopsi Negara-bangsa sebagai bentuk kehidupan politik kenegaraan yang kita pilih, itu semata-mata karena konsep ini memberikan peluang yang lebih besar bagi merebaknya capaian cultural anak-anak negeri pada pagelaran hidup yang lebih beradab dan kaya; meskipun kita sadar bahwa konsep itu kita pinjam dari pengalaman Barat. Sungguh pada tingkatan ini kita menjadi peniru yang cerdas. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, anak negeri ini kehilangan kecerdasan dan sekaligus kedewasaannya dengan mengamini semua yang berbau Barat bahkan dalam selera boga, busana⁶, seni dan juga *bagaimana mengatur ranjang kita*. Kita menjadi peniru yang buruk dan mewarisi yang buruk pula dari *panutan* kita. Gaya hidup hedonis, konsumeris dan

⁴ Menarik untuk membedakan konsep *people* dengan *nation* di mana konsep yang pertama lebih mengacu kepada etnisitas atau ras tertentu yang mendiami lokalias tertentu sehingga bersifat kongkrit-alamiah ; sementara *nation* lebih mengacu kepada suatu gagasan bersama yang mewujud pada system kenegaraan modern sehingga ia bersifat abstrak-artifisial. Pada realitas politik klasik atau pra-modern yang tersedia adalah konsep *people* dan dalam konsep ini pembedaan antara *individu* dan *citizen* masih merupakan sesuatu yang *la-mufakkar*. Periksa John Emerich Edward Dalberg Acton, *Freedom and Power*. (London: Meridian Book, 1956), hlm., 53.

⁵ Untuk efisiensi di sini tidak dibedakan antara kebudayaan (*culture*) dengan peradaban (*civilization*)

⁶ Ketika menyebut busana, bukan saja pikiran saya tertuju pada pakaian-pakaian minim, tetapi juga pakaian kita sendiri ketika prosesi wisuda. Demi Allah STAIN Pamekasan harus menjadi lembaga negeri pertama yang berani mengubahnya sebagai bentuk kecerdasan selera dalam busana, dan *maaf agar tidak terlihat menggelikan*. Mengapa , sebagai contoh, kita tidak mengubah cara prosesinya dengan cara budaya ummat negeri ini menyambut tamu disertai dengan shalawat dan rancak rebana dengan busana yang khas tropis, indah tapi tetap nyaman. Kita mustinya mencukupkan diri mewarisi semangat penjelajahan keilmuan Barat, tanpa harus mengadopsi prosesi seremonialnya yang lebih banyak *nggak nyambung* tersebut.

merusak alam kita peragakan setiap hari. Lebih parah lagi, kita juga mewarisi *sisi gelap* warisan kita sendiri: despotik, tiran, otoriter, dan korup dalam pagelaran kelam negeri ini. (ini benar berlaku pada hampir semua tingkatan dan aspek kehidupan termasuk peragaan keberagamaan⁷). Pada titik ini kita sungguh-sungguh telah menjadi remeh (*mediocre/plebian*) dalam pengertian harfiah kata tersebut, baik pada tataran sebagai individu maupun sebagai bangsa. Ketika kita menempatkan sesuatu yang rendah (materi maupun idea) sebagai yang agung, dan pada saat yang sama kita merendahkan yang agung, sesungguhnya kita telah memperagakan kondisi nihilistik⁸ dan untuk itu kita menjadi remeh. Sungguh kita lantang mengecam nihilisme, tetapi setiap

hari kita merayakan peragaan nihilistik, suatu bentuk *split personality* yang akut kronis sekaligus peragaan hipokritas yang tidak lagi kelam.

Penutup

Sampai di sini apakah masih ada kemungkinan melampaui keremehan kala kondisi nihilistik yang dirayakan hampir semua lapisan di semua ranah kehidupan (termasuk kultural)? Jawabannya, seperti ucapan Shoe Hok Gie yang ingin menembak mati para koruptor tua di Lapangan Banteng, kita mustinya berani menembak *isi otak* kita sendiri (ranah epistemologis) dan mendukung setiap upaya pencarian otentisitas cultural (ranah aksiologis) *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □



⁷ Praktik *Ngambe' Haji* dapat disebut sebagai pagelaran pemaksaan diri dan orang lain di jalanan. Kita bisa menyebutkan sederetan contoh lain yang lebih krusial semisal menjustifikasi penderitaan ummat dan masyarakat sebagai akibat ulah terorganisir dan terencana atas nama takdir.

⁸ Kondisi nihilistik terperagakan ketika nilai-nilai agung kemanusiaan mengalami dekadensi semisal praktik jual-beli gelar akademis atau jual-beli suara dalam pemilu. Ketika ini terjadi, maka lembaga keilmuan, yang pada gilirannya menyentuh semua atribut keilmuan, dan lembaga demokrasi menjadi remeh. Untuk pengertiasn konsep nihilistik –yang merupakan tahapan awal menuju nihilisme—periksa F. Nietzsche, *The Will to Power*. Ter. Walter Kauffmann dan RJ Hollingdale (New York: Vintage Book, 1968), hlm., 321.

